



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Sjahriati Rochmah
2. Jabatan : ASISTEN DEPUTI PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN
3. NHK : 403967

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.209.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/45 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 945.000.000
3. Tanah Seluas 1.377 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, Rp. 510.000.000
4. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, Rp. 102.000.000
5. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, Rp. 72.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 54P CAST WHEEL AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 290.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.500.500.000

**III. HUTANG** Rp. 140.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.360.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.